

**DIPLOMASI MARITIM KOOPERATIF
INDONESIA-VIETNAM DALAM MENANGANI KASUS
ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN KEPULAUAN NATUNA
PADA TAHUN 2020-2022**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun oleh:

**SALWA IKLIMA
07041181823004**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

DIPLOMASI MARITIM KOOPERATIF INDONESIA-VIETNAM DALAM MENANGANI KASUS *ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN KEPULAUAN NATUNA PADA TAHUN 2020-2022

SKRIPSI


Disusun oleh:

SALWA IKLIMA
07041181823004

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 26 Juli 2024

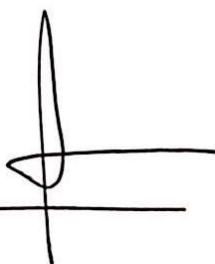
Pembimbing I

Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP.197803022002122002



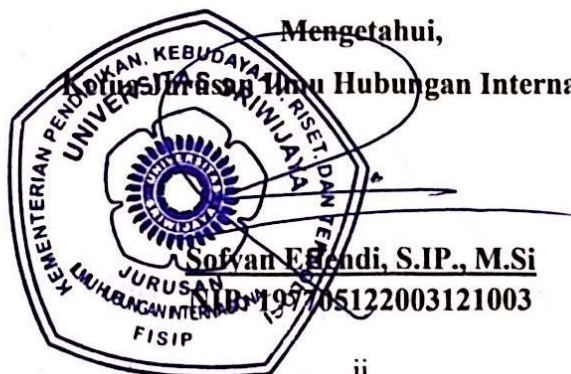
Pembimbing II

Nurul Aulia, S.I.P., M.A.
NIP. 199312222022032013



Mengetahui,

Sofyan Egendi, S.I.P., M.Si



Sofyan Egendi, S.I.P., M.Si
NIP.199705122003121003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

DIPLOMASI MARITIM KOOPERATIF INDONESIA-VIETNAM DALAM MENANGANI KASUS *ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN KEPULAUAN NATUNA PADA TAHUN 2020-2022

SKRIPSI

Disusun oleh:

SALWA IKLIMA
07041181823004

Telah Dipertahankan di Depan Penguji
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Pada Tanggal 26 Juli 2024

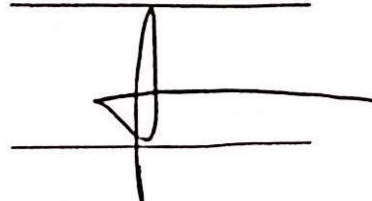
Pembimbing I

Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP. 197803022002122002



Pembimbing II

Nurul Aulia, S.I.P., M.A.
NIP. 19932222022032013



Penguji I

Gunawan Lesatari Elake, S.I.P., M.A
NIP. 198405182018031001

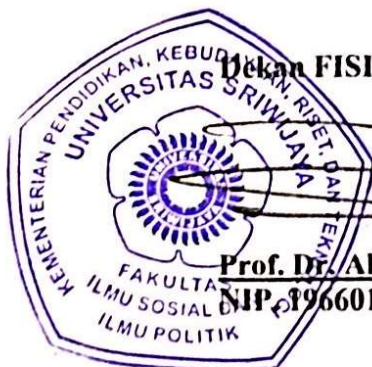


Penguji II

Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc
NIP. 199012062019032017



Mengetahui,



Dekan FISIP UNSRI

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si
NIP. 197705122003121003

LAMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salwa Iklima
NIM : 07041181823004
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa Skripsi saya yang berjudul “Diplomasi Maritim Kooperatif Indonesia-Vietnam dalam menangani Kasus *Illegal Fishing* di perairan Kepulauan Natuna pada tahun 2020-2022” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 5 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Salwa Iklima
07041181823004

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang senantiasa memberikan penulis nikmat kesehatan, kesabaran, dan kelancaran untuk menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang terdekat penulis yang telah banyak ikut berperan dalam medoakan kelancaran untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.

1. Kedua orang tua penulis yang telah senantiasa selalu medoakan dan mensupport penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
2. Keluarga penulis, terima kasih selalu mendoakan, mendukung, serta membantu penulis dalam proses mengerjakan skripsi ini.
3. Ibu Nisyak dan Miss Nurul selaku dosen pembimbing penulis yang telah banyak memberikan masukan, dan membimbing penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
4. Calon suami penulis Ahmad Fauzi, S.T, terima kasih atas dedikasinya untuk selalu menemani penulis dalam keadaan susah maupun senang saat proses menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman- teman saya yang telah banyak mendukung, menghibur, dan memberikan motivasi penulis dalam proses penyelesaian skripsi. Terkhusus untuk Alm.Badar, Steven, Hana, Sonia, Sasa, Imam, Gulu, Faisal, dan Vio.
6. Admin dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya terima kasih telah banyak membantu keperluan penulis dalam pengerjaan skripsi.

ABSTRAK

Diplomasi Maritim merupakan kerangka kebijakan dan konsep kerjasama antar negara yang bertujuan untuk mendukung terciptanya stabilitas keamanan wilayah maritim suatu negara yang rentan terhadap ancaman *illegal fishing*, pencemaran laut, dan kasus penyeludupan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Diplomasi Maritim Kooperatif dapat menjadi upaya penanganan kasus *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia. Seperti fenomena kasus *illegal fishing* Perairan Kepulauan Natuna Pada Tahun 2020-2022. Menggunakan pendekatan deskriptif analitis kualitatif dan Teknik literature review yang didukung untuk mendalami dan mengeksplorasi dari fenomena *illegal fishing* di kepulauan Natuna yang paling banyak dilakukan oleh Vietnam di teritori Indonesia menggunakan data resmi dan kredibel. Reformulasi Diplomasi Maritim dikaji dengan pendekatan Diplomasi Maritim kooperatif oleh Miere memiliki empat indikator dalam diplomasi maritim kooperatif yaitu, *Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HA/DR)*, *Goodwill Visit, Training and Joint Exercise, Joint Maritime Security Operations* sebagai bentuk diplomasi yang dilakukan untuk menangani kasus *illegal fishing*. Setelah teori ini dilakukan akan menghasilkan kesepakatan dan perjanjian antara Indonesia dan Vietnam. Terakhir dilihat bagaimana efektivitas dari hasil perjanjian antara kedua negara tersebut.

Kata Kunci: Diplomasi Maritim, Diplomasi Maritim Kooperatif, Indonesia, Vietnam, *Illegal fishing*

Pembimbing I


Holrun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP.197803022002122002

Pembimbing II


Nurul Aulia, S.I.P., M.A.
NIP. 199312222022032013

Indralaya, 26 Juni 2024

Ketua Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



ABSTRACT

Maritime Diplomacy is a policy framework and cooperative concept between nations aimed at supporting the establishment of security and stability in a country's maritime region, which is vulnerable to threats such as illegal fishing, marine pollution, and smuggling. The objective of this research is to explore how Cooperative Maritime Diplomacy can be an effort to handle illegal fishing cases that occur on the island of Indonesian. Specifically focusing on the phenomenon of illegal fishing in the Natuna Islands waters from 2020 to 2022. Using a qualitative descriptive analytical approach and supported by literature review techniques, this study delves into the prevalence of illegal fishing by Vietnam within Indonesian territory in the Natuna archipelago, relying on official and credible data. The reformulation of Maritime Diplomacy is examined through a cooperative Maritime Diplomacy approach, which includes indicators such as Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HA/DR), Goodwill Visits, Training and Joint Exercises, and Joint Maritime Security Operations. These diplomatic efforts aim to tackle illegal fishing cases. Ultimately, this theoretical exploration leads to agreements and treaties between Indonesia and Vietnam, and their effectiveness is evaluated.

Keywords: *Maritime Diplomacy, Cooperative Maritime Diplomacy, Indonesia, Vietnam, Illegal fishing*

Pembimbing I



Hoiron Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP.197803022002122002

Pembimbing II



Nurul Aulia, S.I.P., M.A.
NIP. 199312222022032013

Indralaya, 26 Juni 2024

**Ketua Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**



Solvan Effendi, S.I.P., M.Si
NIP: 197908122003121003

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan karunia Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Diplomasi Maritim Kooperatif Indonesia dan Vietnam Dalam Menangani Kasus *Illegal Fishing* di perairan Kepulauan Natuna pada Tahun 2020-2022”**. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan spesialisasi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- 1) Diri penulis sendiri karena sudah mau berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini walaupun harus melewati fase jatuh bangun.
- 2) Yurlis dan Rina Faisal selaku kedua orang tua penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, dan juga bantuan tiada tara dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 3) Kedua saudara penulis Aula Sakinah dan M. Faizun Ilham yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 4) Keluarga besar Faisal yang juga ikut serta dalam memberikan dukungan dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 5) Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- 6) Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.
- 7) Bapak H. Azhar, SH.,M.Sc.,LL.M.,LL.D selaku Dosen Pembimbing akademik penulis.
- 8) Ibu Khoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
- 9) Ibu Nurul Aulia, S.I.P., M.A selaku dosen pembimbing kedua saya yang selalu menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran juga untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi.

- 10) Bapak Gunawan Lestari Elake, S.IP., M.A. selaku dosen penguji yang telah memberika masukan serta arahan dalam penulisan skripsi penulis.
- 11) Ibu Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan serta arahan dalam penulisan skripsi penulis.
- 12) Seluruh dosen serta staf jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya atas ilmu dan bantuan yang selalu diberikan kepada kami.
- 13) Untuk Imam, Faisal, Vio, Gulu, Andre, Sasa, Niken, Hana, Steven. Terimakasih telah menjadi teman yang mau mendengarkan keluh kesah penulis selama proses pembuatan skripsi ini berjalan.
- 14) Untuk calon suamiku, Ahmad Fauzi, S.T. terimakasih telah meluangkan waktunya untuk menemani penulis selama proses pembuatan skripsi ini.
- 15) Almamaterku.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Indralaya, 26 Juni 2024

Salwa Iklima
07041181823004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
LAMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Penelitian Terdahulu.....	7
2.2. Kerangka Konseptual dan Teori	13
2.2.1. Diplomasi Maritim	13
2.2.2. Diplomasi Maritim Kooperatif.....	14
2.3. Alur Pemikiran	17
2.4. Argumen Utama	17
BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1. Desain Penelitian	19
3.2. Definisi Konsep	19
3.3. Fokus Penelitian	20
3.4. Unit Analisis	21
3.5. Jenis dan Sumber Data	22
3.6. Teknik Pengumpulan Data	22
3.7. Teknik Keabsahan Data.....	23

3.8.	Teknik Analisis Data	23
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN		24
4.1.	Gambaran Umum Indonesia- Vietnam.....	24
4.1.1.	Letak Geografis Indonesia dan Vietnam	26
4.1.2.	Deklarasi Djuanda dan <i>United Nation Convention on the Law of the Sea</i> (UNCLOS)	28
4.1.3.	Pendapatan Indonesia dan Vietnam Dalam Sektor Perikanan.....	30
4.2.	Sejarah Hubungan Diplomasi Indonesia dan Vietnam.....	30
4.3.	Perjanjian batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Vietnam tahun 2022.....	35
4.4.	Sumber Daya Laut di Perairan Kepulauan Natuna.....	36
4.5.	Kegiatan <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Kepulauan Natuna.....	38
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		40
5.1.	<i>Humanitarian Assistance (HA)</i> atau <i>Disaster Response (DR)</i>	41
5.1.1.	Bantuan Dalam Upaya Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> Melalui BAKAMLA dan <i>Vietnam Cost Guard</i>	42
5.2.	<i>Goodwill Visit</i>	45
5.2.1.	Kunjungan Temu Muhibah antara Angkatan Laut Vietnam dan Indonesia	46
5.3.	<i>Training and Joint Exercise</i>	47
5.3.1.	<i>Coordinated Exercise 22B-1</i>	47
5.4.	<i>Joint Maritime Security Operations</i>	49
5.4.1.	<i>MA Rule- Based Maritime Order</i>	50
5.5.	Pendekatan Lain Yang Digunakan Dalam Mengatasi <i>Illegal Fishing</i> Indonesia- Vietnam Diluar Dimensi Diplomasi Maritim Kooperatif Le Miere	52
5.5.1.	Upaya Penyelesaian Tumpang Tindih Wilayah ZEE antara Indonesia dan Vietnam	53
5.5.2.	Kerjasama Indonesia Vietnam Dalam Penyelesaian Masalah <i>Illegal Fishing</i> Di Perairan Natuna Secara Kooperatif	54
5.6.	<i>Illegal Fishing</i> Oleh Vietnam di Indonesia Tahun 2023	54
BAB VI PENUTUP		57
6.1.	Kesimpulan.....	57
6.2.	Saran	58
DAFTAR PUSTAKA		59
LAMPIRAN		66

DAFTAR TABEL

Tabel 1 1. Jumlah Kapal Pelaku <i>Illegal Fishing</i> di Laut Natuna Sejak Tahun 2017-2020 ..	2
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu Kasus <i>Illegal Fishing</i> di Wilayah Perairan Indonesia	7
Tabel 3.1. Fokus Penelitian.....	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Klasifikasi Diplomasi Maritim Kooperatif	13
Gambar 2.2. Alur Pemikiran	17
Gambar 4.1. Peta Laut Natuna	26
Gambar 4.2. Kesepakatan MoU Indonesia dan Vietnam.....	34
Gambar 4.3. Pertemuan Bilateral Presiden Jokowi dengan Presiden Vietnam Sepakati Batas ZEE	35
Gambar 4. 4. Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI).....	37
Gambar 5.1. <i>Building Indonesia-Vietnam Maritime Partnership</i>	42
Gambar 5.2. Kunjungan Kerja Angkatan Laut Vietnam-Indonesia di Pelabuhan Batu Ampar, Indonesia	46
Gambar 5.3. Latihan Bersama Angkatan Laut Vietnam-Indonesia di perairan timur Pulau Bintan, Kepri	48
Gambar 5.4. Pertemuan Perdana <i>ASEAN Coast Guard Forum</i> di Legian, Bali	51
Gambar 5. 5. Data <i>Illegal Fishing</i> oleh Vietnam di Laut Natuna pada Tahun 2021-2023	56

DAFTAR SINGKATAN

AIS	: <i>Automatic Identification System</i>
BAKAMLA	: Badan Keamanan Laut
HA/DR	: <i>Humanitarian Assistance and Disaster Relief</i>
IOJI	: <i>Indonesian Ocean Justice Initiative</i>
IUU	: <i>Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing</i>
KIA	: Kapal Ikan Asing
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
LNU	: Laut Natuna Utara
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	: Produk Domestik Bruto
PMD	: Poros Maritim Dunia
RDV	: Republik Demokrasi Vietnam
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SDA	: Sumber Daya Alam
SMB	: <i>Single Maritime Boundary</i>
TZMKO	: <i>Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie</i>
UNCLOS	: <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i>
VCG	: <i>Vietnam Coast Guard</i>
VOC	: <i>Vereenigde Oostindische Compagnie</i>
WNI	: Warga Negara Indonesia
WPP RI	: Wilayah Pengelola Perikanan Kepri
ZEEI	: Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Luas laut yang lebih besar dibandingkan dengan luas daratan menjadikan negara Indonesia lebih dikenal sebagai Negara kepulauan sekaligus maritim. Jika dijelaskan secara rinci, luas Indonesia sekitar 5.455.675 km² dan Dimana 2/3 luas wilayahnya adalah lautan sebesar 3.544.74 km². Disamping itu, negara Indonesia membagi tiga macam jenis batas wilayah lautnya yakni batas laut territorial sekitar 282.583 km², Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sekitar 2.936.345 km², dan 2.749.001 km² luas dari batas landasan kontinen Indonesia (KKP, 2019). Dilihat dari penjabaran diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa wilayah laut Indonesia sangat luas, sehingga dapat menjadikannya sebagai potensi untuk memajukan sektor perekonomian laut dengan cara mengelola hasil sumber daya alam lautnya yang melimpah melalui hasil perikanan tangkap.

Perairan kepulauan Natuna merupakan kabupaten yang terletak di wilayah provinsi kepulauan Riau, mempunyai luas lautan mencapai 222.683,39 km² dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga antara lain negara Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja (BPS, 2019). Selain itu, perairan kepulauan Natuna menjadi tempat titik simpul pelayaran internasional yang menghubungkan antara negara China, Hongkong, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2019), potensi sektor perikanan di provinsi kepulauan Riau masuk ke dalam lima besar provinsi penghasil produksi perikanan tangkap di Indonesia sebesar 1,8 juta ton pertahun. Jenis- jenis hasil perikanan tangkap yakni cumi-cumi, ikan kuwe, kerapu, kakap merah, dan tongkol. Dengan potensi pasokan perikanan di perairan kepulauan Natuna yang melimpah, tidak dapat dipungkiri adanya permasalahan yang akan dihadapi, salah satunya ialah kasus *illegal fishing*. *Illegal fishing* di definisikan sebagai penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal

nelayan dari negara lain yang memasuki wilayah yurisdiksi laut suatu negara tanpa izin dan melawan hukum negara tersebut (Djumala, D., 2021).

Kasus *illegal fishing* biasanya dipicu oleh beberapa hal yakni adanya tumpang tindih klaim di wilayah perairan laut Natuna, kurangnya pengetahuan nelayan lokal maupun asing tentang batas-batas wilayah di perairan, dan terakhir peran dari Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) sebagai *Coast Guard* Indonesia masih belum optimal (Muhamad, S. V. 2012). Tumpang tindih wilayah perairan laut merupakan kondisi dimana belum adanya kepastian dan kejelasan hukum mengenai batas laut antara kedua negara atau lebih yang saling bersinggungan (Djumala, D., 2021). Kondisi itu yang menyebabkan nelayan lokal maupun asing kurang memahami batas-batas wilayah perairan tersebut. Di samping itu, peran dari BAKAMLA yang masih belum optimal, karena kurangnya sumber daya manusia dan dana terbatas sehingga kemampuan untuk mengawasi setiap titik masuk wilayah perairan laut menjadi terbatas. Dengan keterbatasan pengawasan laut ini akan menjadi celah bagi nelayan asing untuk melakukan kegiatan *illegal fishing* di perairan laut Natuna (Djumala, D., 2021). Jumlah kasus *illegal fishing* sejak tahun 2017-2020 yang dilaporkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP, 2020) sebanyak 176 kapal untuk lebih jelas dapat dilihat dalam Tabel 1.1. sebagai berikut.

Tabel 1 1. Jumlah Kapal Pelaku *Illegal Fishing* di Laut Natuna Sejak Tahun 2017-2020

No.	Negara	2017	2018	2019	2020	Jumlah
1.	Vietnam	21 kapal	22 kapal	19 kapal	27 kapal	89 kapal
2.	Malaysia	5 kapal	11 kapal	20 kapal	16 kapal	52 kapal
3.	Filipina	4 kapal	4 kapal	11 kapal	14 kapal	33 kapal
4.	Panama	-	-	1 kapal	-	1 kapal
5.	Taiwan	-	-	-	1 kapal	1 kapal
Total		30 kapal	37 kapal	51 kapal	58 kapal	176 kapal

(Sumber: KKP, 2020)

Berdasarkan Tabel 1.1. ditunjukkan bahwa data *illegal fishing* sejak tahun 2017-2020 sejumlah 176 Kapal Ikan Asing (KIA) yang diberhasil ditangkap oleh armada Kapal Pengawas Perikanan (KPP), dengan rincian kapal berbendera Vietnam sebanyak 89 kapal, berbendera Malaysia sebanyak 52 kapal, berbendera Filipina sebanyak 33 kapal, 1 kapal berbendera Panama, dan 1 kapal berbendera Taiwan. Dari fakta tersebut, dapat dilihat bahwa ada banyak KIA berbendera Vietnam yang melakukan *illegal fishing* di perairan kepulauan Natuna dan mencapai puncak kasusnya pada tahun 2020.

Vietnam masuk kedalam 10 besar negara pengekspor hasil perikanan terbesar, dimana 600 lebih badan usaha yang ikut serta untuk masuk ke 165 pasar di dunia (Anindia, C. P. 2016). Oleh karena itu, perekonomian Vietnam sebagian besar berasal dari hasil perikanan. Menurut Saptanto, S., (2011) menjelaskan bahwa kebutuhan perikanan negara Vietnam yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan ekspor perikanannya, di tambah berdekatan posisi perbatasan laut Indonesia serta melimpahnya sumber daya alam laut khususnya wilayah perairan kepulauan Natuna, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi nelayan Vietnam untuk memasuki dan melakukan aktivitas *illegal fishing* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Pemerintah Indonesia dan Vietnam sama-sama mengandalkan sektor perikanan untuk menunjang perekonomian negara masing-masing. Kegiatan *illegal fishing* di perairan kepulauan Natuna yang dilakukan oleh nelayan Vietnam secara terus-menerus akan menjadi masalah serius bagi negara Indonesia, karena berpengaruh terhadap surplus pendapatan negara dalam sektor perikanan. Masalah ini juga akan dapat mengancam kedaulatan negara Indonesia, khususnya di wilayah perairan kepulauan Natuna. Menurut Djumala (2021), dengan terancam kedaulatan negara Indonesia di laut Natuna akan mempengaruhi visi Indonesia untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) sehingga kita harus menjamin bahwa wilayah perairan Indonesia dan sekitar aman dari segala ancaman

tindak kejahatan di laut. Oleh karena itu, kerja sama dengan Vietnam untuk menemukan titik terang dalam penyelesaian kasus *illegal fishing* di perairan kepulauan Natuna di perlukan.

Kegiatan *illegal fishing* dikategorikan sebagai ancaman non tradisional, dikarenakan ancaman tersebut tidak berkaitan dengan penyerangan militer sehingga tidak perlu diselesaikan dengan kekuatan militer. Oleh karena itu, diplomasi maritim kooperatif digunakan sebagai upaya dari penyelesaian kasus *illegal fishing* di perairan Natuna. Kebijakan diplomasi maritim kooperatif ialah langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menangani kasus *illegal fishing* di perairan kepulauan Natuna yang dilakukan oleh nelayan Vietnam.

Ada beberapa kerangka kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Vietnam untuk mengurangi kasus *illegal fishing*, antara lain menertibkan kapal-kapal Vietnam, memperkuat keamanan laut serta mengurangi kasus *illegal fishing* dari ancaman luar. Untuk itu negara Indonesia dan Vietnam menyepakati kerja sama resmi di bidang maritim dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU). Kesepakatan tersebut ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2021 oleh Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia dan Komandan Vietnam *Coast Guard* Mayor Jenderal Le Quang Dao di dua tempat yang berbeda, yakni Markas Besar Vietnam *Coast Guard* dan di Markas Besar Bakamla RI di Menteng, Jakarta Pusat. Kedua pemerintah bermaksud menjalin kerja sama keamanan dan keselamatan dalam bidang maritim, yaitu sebagai berikut (BAKAMLA, 2021):

1. Peningkatan kapasitas terkait keamanan dan keselamatan maritim melalui latihan bersama, pelatihan, pendidikan, lokakarya, dan seminar.
2. Pelaksanaan gelar wicara antara sesama penjaga pantai.
3. Berbagi informasi dan komunikasi.
4. Operasi pencarian dan penyelamatan serta kegiatan pencegahan tindak kejahatan di laut.
5. Lawatan pelabuhan.

6. Kegiatan penegakan hukum termasuk dalam pemberantasan kegiatan *Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing* (IUU) dengan selalu tetap memperhatikan kedaulatan masing-masing negara.

Dari ke enam point prioritas kerja sama yang terdapat dalam kesepakatan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang telah dibahas diatas, penulis tertarik untuk membahas point ke enam mengenai pemberantasan kegiatan *illegal fishing* mengingat intensitas kasus *illegal fishing* sering terjadi di perairan kepulauan Natuna. Terbentuknya kerja sama diplomasi maritim kooperatif di antara Indonesia dan Vietnam dapat memperkuat keamanan laut serta mengurangi angka pencurian ikan (*illegal fishing*). Tujuan Indonesia menyepakati adanya diplomasi maritim kooperatif melalui kesepakatan MoU tak lain ialah untuk menjaga kekayaan sumber daya alam laut Indonesia dan kedaulatan wilayah laut Indonesia khususnya di perairan kepulauan Natuna dari penangkapan ikan secara *illegal (illegal fishing)*. Berdasarkan latar belakang dari uraian di atas yaitu tingginya kasus *illegal fishing* oleh nelayan Vietnam di wilayah perairan laut Natuna. Oleh karena itu, penulis akan menjawab pertanyaan penelitian yaitu: **“Bagaimana Diplomasi Maritim Kooperatif Indonesia-Vietnam Terhadap Kasus Illegal Fishing Di Perairan Kepulauan Natuna Pada Tahun 2020-2022?”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang dan permasalahan yang telah terjadi, penulis melihat pentingnya diplomasi maritim kooperatif bagi negara Indonesia dan Vietnam. Maka penulis menarik sebuah rumusan masalah yaitu:

“Bagaimana Diplomasi Maritim Kooperatif Indonesia-Vietnam Terhadap Kasus Illegal Fishing Di Perairan Kepulauan Natuna Pada Tahun 2020-2022?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yang penulis ingin sampaikan dengan menarik hasil pada rumusan masalah adalah untuk mengetahui bagaimana diplomasi maritim kooperatif Indonesia-Vietnam terhadap kasus *illegal fishing* di perairan kepulauan Natuna pada tahun 2020-2022.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dikategorikan menjadi dua bagian sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang dapat dijadikan bahan pembelajaran dan referensi kajian bagi mahasiswa Hubungan Internasional yang terkait dengan diplomasi maritim kooperatif antara negara Indonesia dan Vietnam khususnya dalam menangani kasus *illegal fishing* di Perairan Kepulauan Natuna pada tahun 2020-2022.

2. Manfaat praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara rinci dan acuan bagi semua kalangan khususnya mahasiswa Hubungan Internasional tentang sejauh mana upaya yang dilakukan pemerintah negara Indonesia dalam menangani kasus *illegal fishing* di Perairan Kepulauan Natuna melalui diplomasi maritim kooperatif antara negara Indonesia dan Vietnam pada tahun 2020-2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelia, D. (18 Desember 2021). *Potensi Besar Kekayaan Laut Natuna*. Jakarta: goodnewsindonesia.id diakses pada tanggal 15 Januari 2024. [https://www-goodnewsfromindonesia.id/2021/12/18/mengintip-potensi-kekayaan-laut-natuna](https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/12/18/mengintip-potensi-kekayaan-laut-natuna).
- Anindia, C.P. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Kerjasama Indonesia dengan Vietnam Dalam Menangani IUU Fishing. *Journal of International Relations*. 2: 220-221.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azanella, L. A., dan Kurniawan, R. F. (3 Desember 2021). *Mengenal Natuna, Letak dan Potensi Kekayaan Alamnya*. Jakarta: Kompas.com diakses pada tanggal 27 Desember 2023. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/12/03/183000865-/mengenal-natuna-letak-dan-potensi-kekayaan-alamnya>.
- Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. 2021. *Bakamla RI-Vietnam Coast Guard Jalin Kerja Sama Keamanan dan Keselamatan Maritim*. Online: Badan Keamanan Laut Website (bakamla.go.id). (Diakses pada tanggal 31 Agustus 2022).
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Wilayah Perairan Natuna dan Potensi Hasil Perikanan Tangkap*. Online: Badan Pusat Statistik (bps.go.id). (Diakses pada tanggal 30 Agustus 2022).
- Bakamla.go.id. (28 Desember 2021). *Bakamla RI-Vietnam Coast Guard Jalin Kerja Sama Keamanan dan Keselamatan Maritim*. Jakarta: Bakamla diakses tanggal 15 November 2023. https://bakamla.go.id/publication/detail_news/bakamla-ri-vietnam-coast-guard-jalin-kerja-sama-keamanan-dan-keselamatan-maritim.
- Butcher, J. G., dan Elson, R. E. 2017. *Sovereignty and the Sea: How Indonesia Became an Archipelagic State*. Singapore: NUS Press.
- Cassidy, F. 2016. *Diplomasi Poros Maritim: Keamanan Maritim dalam Perspektif Politik Luar Negeri*. Jakarta Utara: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian luar Negeri Republik Indonesia.
- Christiana, D. W., Pairunan, R., dan Ibrahim, L. K. J. (22 April 2024). *Menuju Hilirisasi Sektor Perikanan Indonesia yang Kuat dan Berkelanjutan*. Jakarta: WRI Indonesia diakses pada tanggal 23 November 2023. <https://wri-indonesia.org/id/>

wawasan/menjuhu-hilirisasi-sektor-perikanan-indonesia-yang-kuat-dan-berkelanjutan.

- Deskayanti, Y. (15 Desember 2022). *Penentuan Batas ZEE Wilayah Laut Natuna, Urgensi Kesepakatan antara Indonesia-Vietnam*. Jakarta: mcpr.komitmen.org diakses tanggal 10 November 2023. <https://mcpr.komitmen.org/2022/12/15/penentuan-batas-zee-wilayah-laut-natuna-urgensi-kesepakatan-antara-indonesia-vietnam/>.
- Djalal, H. 2001. *'Deklarasi Djuanda Menyatukan Kita' dalam Awaloedin Djamin (ed.), Pahlawan Nasional Ir. H. Djuanda: Negarawan, Administrator, dan Teknokrat Utama*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Djumala, D. 2021. *Diplomasi Membumi: Narasi Cita Diplomat Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Gischa, S. (12 Agustus 2022). *Kedatangan Portugis dan Spanyol ke Indonesia*. Jakarta: Kompas.com diakses pada tanggal 6 November 2023. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/08/12/170000669/kedatangan-portugis-dan-spanyol-ke-indonesia?page=all#:~:text=Bangsa%20pertama%-20yang%20menjajah%-20Indonesia%2C%20yaitu%20Portugis%20dan,Nusantara%20adalah%20mencari%20dunia%20baru%20penghasil%20rempah%20rempah.>
- Hasan, M. I. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hasibuan, F. I. 2021. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Wilayah Kerja Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai. *Jurnal Kajian Hukum*. 2(2): 173-182.
- Hukum Online.com. (9 Januari 2020). *Kenali UNCLOS, Dasar Hukum Internasional untuk Kedaulatan Indonesia di Natuna*. Jakarta: Hukumonline.com diakses tanggal 11 November 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-unclos--dasar-hukum-internasional-untuk-kedaulatan-indonesia-di-natuna-lt5e16f5b67589c?-page=all>.
- Inayah, A., dan Hadiawan, A. 2020. Diplomasi Maritim Indonesia Dalam Menangani Masalah *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUUF) di Perairan Pesisir Barat, Lampung. *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*. 22(2):106-111.
- Indonesia Defence Magazine. (21 Desember 2021). *Bakamla RI-Vietnam Coast Guard Jalin Kerja Sama Keamanan dan Keselamatan Maritim*. Jakarta: Indonesiadefence.com diakses pada tanggal 10 September 2024.

<https://indonesiadefense.com/bakamla-ri-vietnam-coast-guard-jalin-kerja-sama-keamanan-dan-keselamatan-maritim/>.

Indo-Pacific Defense Forum. (5 Maret 2022). *Indonesia spearheading regional cooperation in South China Sea*. Jakarta: Ipdefenceforum.com diakses pada tanggal 15 September 2024. <https://ipdefenseforum.com/2022/03/indonesia-spearheading-regional-cooperation-in-south-china-sea/>.

Intan, G. (22 Desember 2022). *Dua Belas Tahun Berunding, Indonesia-Vietnam Sepakati Batas ZEE*. Jakarta: Voaindonesia.com diakses pada tanggal 5 Mei 2024. <https://www.voaindonesia.com/a/dua-belas-tahun-berunding-indonesia-vietnam-sepakati-batas-zee/6887429.html>.

Juanita, M.D., Supartono., dan Purwanto. 2021. Peran Diplomasi Maritim Dalam Menangani Krisis di Laut Natuna Utara Antara Indonesia-China. *Jurnal Keamanan Maritim*. 7(1): 68-70.

Kementrian Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*. Jakarta: Kementrian Bappenas. Hal. 99.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2019. *Letak Teritorial Wilayah Indonesia dan Potensi Sumber Daya Alam*: Jakarta.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2020. *Data Illegal Fishing Sejak Tahun 2017-2020 di Perairan Kepulauan Natuna*. Online: KKP | Kementerian Kelautan dan Perikanan. (Diakses pada tanggal 31 Agustus 2022).

Kemhan.go.id. (22 November 2022). *Wamenhan RI Sambut Baik Pertemuan Perdana ASEAN COAST GUARD FORUM*. Jakarta: Kemhan diakses pada tanggal 15 Maret 2024. <https://www.kemhan.go.id/2022/11/22/wamenhan-ri-sambut-baik-pertemuan-perdana-asean-coast-guard-forum.html>.

Kemlu.go.id. (1 Maret 2024). *Pemerintah Indonesia Melalui KJRI Ho Chi Minh City Bantu Repatriasi 10 ABK WNI dari Vietnam*. Hanoi: Kemlu diakses tanggal 2 Agustus 2024. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/5788/berita/pemerintah-indonesia-melalui-kjri-ho-chi->.

Kemlu.go.id. (30 November 2021). *Roundtable Discussion: Membangun Kemitraan di Bidang Maritim antara Indonesia-Vietnam*. Hanoi: Kemlu diakses tanggal 15 Januari 2024. <https://kemlu.go.id/portal/i/read/3208/berita/roundtable-discussion-membangun-kemitraan-di-bidang-maritim-antara-indonesia-vietnam>.

- Kemlu.go.id. (22 Agustus 2019). *Pertemuan Teknis ke-12 Batas Maritim RI-Vietnam, Awali Konsultasi Informal Provisional Arrangement*. Surabaya: Kemlu diakses tanggal 4 Agustus 2024. <https://kemlu.go.id/portal/i/read/543/berita/pertemuan-teknis-ke-12-batasmaritim-ri-vietnam-awali-konsultasi-informal-provisional-arrangement>.
- Kien, K., (1 Desember 2021). *Building Indonesia-Vietnam Maritime Partnership*. Hanoi: Communist Party of Vietnam diakses pada tanggal 30 Juli 2024. <https://en.dangcongsan.vn/vietnam-today/building-indonesiavietnam-maritime-partnership-588034.html>.
- Kkp.go.id. (31 Maret 2021). *KKP dan Kejaksaan Tenggelamkan 10 Kapal Illegal Fishing di Laut Natuna Utara*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan diakses pada tanggal 25 Januari 2024. <https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-dan-kejaksaan-tenggelamkan-10-kapal-illegal-fishing-di-laut-natuna-utara65c3082-9593ff.html>.
- Kusumaatmadja, M. 2003. *Konsepsi Hukum Negara Nusantara pada Konferensi Hukum Laut III*. Bandung: kerjasama antara PT. Alumni Bandung dengan Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, 2003, hal. 13.
- Lamont, C. 2015. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miere, C. L. 2014. *Maritime Diplomacy in the 21st Century: Drivers and Challenges*. New York: Routledge.
- Muhamad, S. V. 2012. *Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan*. *Jurnal Politica*. 3(1): 61-71.
- Nailufar, N. N. (8 Maret 2020). *Hari ini dalam Sejarah: Belanda Serahkan Indonesia ke Jepang*. Jakarta: Kompas.com diakses pada tanggal 7 November 2023. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/08/110000369/hari-ini-dalam-sejarah-belanda-serahkan-indonesia-ke-jepang?page=all>.
- Ningsih, W. L. (31 Agustus 2023). *Latar Belakang Perang Vietnam yang Melibatkan Dua Negara Adikuasa*. Jakarta: Kompas.com diakses pada tanggal 5 November 2023. <https://www.kompas.com/stori/read/2023/08/31/080000979/latar-belakang-perang-vietnam-yang-melibatkan-dua-negara-adikuasa?page=1>.
- Nugroho, H. B. 2012. 'Law of the Sea Aspects of Indonesian National Legislation on Submarine Telecommunications Cable' dalam: Myron H. Nordquist (ed.). *Maritime Border Diplomacy*. Leiden & Boston: Martinus Nijhoff.

- Oceanjusticeinitiative.org. (30 Juli 2023). *Pelajaran dari Penggagalan Transshipment Kapal Supertanker Iran dan Kamerun oleh Bakamla*. Jakarta: Ocean Justice Initiative diakses pada tanggal 20 Mei 2024. <https://oceanjusticeinitiative.org/2023-07/30/pelajaran-dari-penggagalan-transshipment-kapal-supertanker-iran-dan-kamerun-oleh-bakamla/>.
- Oceanjusticeinitiative.org. (29 April 2021). *IUU Fishing Di Laut Natuna Utara Kuartal-I 2021 Dalam Kondisi Kritis*. Jakarta: Ocean Justice Initiative diakses pada tanggal 23 Maret 2024. <https://oceanjusticeinitiative.org/2021/04/29/iuu-fishing-di-laut-natuna-utara-kuartal-i-2021-dalam-kondisi-kritis/>.
- Pertamina.com. (31 Mei 2023). *Pertamina Tanda Tangani Kontrak Kerja Sama Pengelolaan WK Peri Mahakam dan WK East Natuna*. Jakarta: PT Pertamina Hulu Borneo diakses pada tanggal 17 Februari 2024. <https://phe.pertamina.com/csr/pertamina-tanda-tangani-kontrak-kerja-sama-pengelolaan-wk-peri-mahakam-dan-wk-east-natuna>.
- Puspitawati, D. 2017. *Hukum Laut Internasional*. Jakarta: Kencana.
- Respati, A. R., dan Ika, A. (29 Juli 2022). *PNBP Sektor Perikanan Tangkap Tumbuh 111,8 Persen, Ini Penopangnya*. Jakarta: Kompas.com diakses pada tanggal 17 Desember 2023. <https://money.kompas.com/read/2022/07/29/120000026/pnbp-sektor-perikanan-tangkap-tumbuh-111-8-persen-ini-penopangnya>.
- Riska, E. 2017. Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan *Ilegal (Illegal Fishing)* Oleh Nelayan China di ZEEI Perairan Kepulauan Natuna. *Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan*. 3(2): 33-36.
- Ritonga, R. 2016. *Kesadaran Baru Maritim Biografi Laksamana TNI Dr. Marsetio*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Riza, A.S., Ramlan, R., dan Rahayu, R. H. 2021. Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut Antara Indonesia-Vietnam Di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Journal of International Law*. 2(2): 167-188.
- Sabki, M. (31 Maret 2021). *Duaarr! 10 Kapal Vietnam Pencuri Ikan Ditenggelamkan*. Jakarta: CNBC Indonesia diakses pada tanggal 17 Maret 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210330132036-7-233960/duaarr-10-kapal-vietnam-pencuri-ikan-ditenggelamkan>.
- Sahputra, Y. E. (29 November 2023). *Nelayan Natuna Kembali Laporkan Maraknya KIA Vietnam*. Jakarta: Mongabay.co.id diakses pada tanggal 16 April 2024.

<https://www.mongabay.co.id/2023/11/29/nelayan-natuna-kembali-laporkan-maraknya-kia-vietnam/>.

- Saptanto, S. 2011. Daya Saing Ekspor Produk Perikanan Indonesia Di Lingkup ASEAN dan ASEAN-China. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. 6(1): 53-57.
- Sasmita, A.I., Bramasta. B., dan Widiana, F. 2021. Diplomasi Maritim Indonesia dalam Kasus *Illegal Fishing* oleh Nelayan Vietnam tahun 2018-2019. *Journal Hubungan Internasional*. 14(1): 81-85.
- Shita, G. (21 Mei 2021). *Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara*. Jakarta: Handal selaras diakses pada tanggal 10 Februari 2024. <https://www.handalselaras.com/wilayah-pengelolaan-perikanan-negara/>.
- Siahaan, R. S. 2021. Upaya Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Vietnam Dalam Mengatasi *Illegal Unreported Unregulated Fishing* (IUU Fishing) Pada Era Joko Widodo. Skripsi, Universitas Sumatera Utara.
- Simanjuntak, M., 2018. *Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut: Makna dan Manfaatnya Bagi Bangsa Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media. Hal.90.
- Supramono, G. 2011. *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Van, V. (30 Desember 2022). *Tahun 2022, Ekonomi Vietnam Mencapai Prestasi yang Mengesankan*. Hanoi: Vovworld.vn diakses pada tanggal 10 Desember 2023. <https://vovworld.vn/id-ID/ulasan-berita/tahun-2022-ekonomi-vietnam-mencapai-prestasi-yang-mengesankan-1164573.vov>.
- Vietnamplus.vn. (20 Juni 2022). *UNCLOS significant to international peace, security: experts*. Hanoi: Vietnamplus.vn diakses pada tanggal 20 Desember 2023. <https://en.vietnamplus.vn/unclos-significant-to-international-peace-security-experts-post231388.vnp>.
- Vovworld.vn. (30 Agustus 2022). *Rombongan Kerja Angkatan Laut Vietnam Lakukan Kunjungan, Temu Muhibah, dan Latihan Gabungan dengan Angkatan Laut Indonesia*. Jakarta: Vovworld.vn diakses pada tanggal 10 Maret 2024. <https://vovworld.vn/id-ID/berita/rombongan-kerja-angkatan-laut-vietnam-lakukan-kunjungan-temu-muhibah-dan-latihan-gabungan-dengan-angkatan-laut-indonesia-1130691.vov>.
- Wiyoga, P. (3 September 2022). *Tingkatkan Kerja Sama, TNI AL Latihan Bersama Vietnam di Perairan Bintan*. Jakarta: Kompas.com diakses pada tanggal 7 Februari 2024.

https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/09/03/tingkatkan-kerja-sama-tni-al-latihan-bersama-vietnam?status=sukses_login&status_login=login.

Zara, M.Y. (11 November 2023). *Deklarasi Djuanda*. Jakarta: Universitas Negeri Yogyakarta diakses pada tanggal 17 November 2023. https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Deklarasi_Djuanda.